

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² atau sekitar 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara. Letak tersebut menjadikan Kota Semarang berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, serta simpul logistik utama di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Keberadaannya di jalur utama mobilitas orang dan barang membuat aktivitas ekonomi di Kota Semarang berlangsung cukup padat, tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat kota, tetapi juga berperan sebagai penghubung arus perdagangan bagi wilayah hinterland di sekitarnya.

Dilihat dari karakter fisiknya, Kota Semarang memperlihatkan perpaduan antara wilayah dataran rendah pesisir di bagian utara dan wilayah yang semakin berbukit ke arah selatan. Kondisi bentang alam ini memengaruhi pola persebaran penduduk dan aktivitas ekonomi yang berkembang di setiap kawasan. Wilayah utara cenderung didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, serta aktivitas pelabuhan dan logistik, sedangkan wilayah tengah hingga selatan berkembang seiring dengan pertumbuhan permukiman, jasa lokal, serta usaha kuliner dan ritel yang mengikuti konsentrasi penduduk. Gambaran mengenai kondisi wilayah dan pembagian

administratif Kota Semarang terdokumentasi dalam berbagai publikasi statistik daerah, seperti *Kota Semarang Dalam Angka*, yang sering dijadikan rujukan akademik untuk menjelaskan profil wilayah penelitian.

Dari pemerintahan daerah, Kota Semarang terbagi ke dalam wilayah administratif hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Struktur administratif ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan dan pemberdayaan UMKM. Berbagai layanan seperti pendataan usaha, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta akses pembiayaan umumnya disalurkan melalui kecamatan dan kelurahan dengan menyesuaikan karakteristik UMKM di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, kondisi geografis, karakter fisik wilayah, dan struktur administrasi Kota Semarang menjadi konteks penting dalam memahami dinamika sosial ekonomi serta ketahanan dan adaptasi UMKM di Kota Semarang.

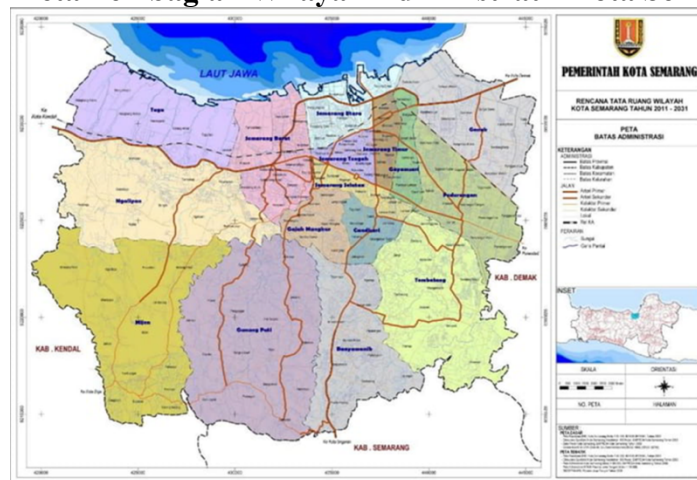
2.1.1 Kondisi geografis dan administratif

Dalam penelitian UMKM, kondisi geografis dan administratif memiliki peran penting karena berpengaruh terhadap sebaran pasar, biaya distribusi, kemudahan akses ke pusat perdagangan, serta tingkat kerentanan usaha terhadap risiko lingkungan seperti banjir dan rob, khususnya di wilayah pesisir Kota Semarang. Perbedaan karakter wilayah juga menyebabkan perkembangan UMKM antar-kecamatan tidak seragam, baik dari sisi sektor usaha maupun skala aktivitas ekonomi.

Pada praktiknya, kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di tingkat daerah umumnya berbasis wilayah administratif. Pendataan pelaku usaha, pemetaan sentra UMKM, hingga pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perizinan dilakukan

dengan mengacu pada kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geografis dan administratif Kota Semarang menjadi dasar penting dalam menganalisis variasi efektivitas program UMKM di masing-masing wilayah. Uraian ini diperkuat dengan gambar Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang, sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Peta Pembagian Wilayah Administratif Kota Semarang



Sumber: ppid.semarangkota.go.id

Secara administratif, Kota Semarang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Perbedaan kepadatan ini turut memengaruhi karakter aktivitas ekonomi dan persebaran UMKM di masing-masing wilayah. Adapun gambaran kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
Mijen	5,31	1.591,35
Gunungpati	5,94	1.729,00
Banyumanik	8,46	4.822,53
Gajahmungkur	3,32	6.030,73
Semarang Selatan	3,67	10.456,73
Candisari	4,46	11.820,08
Tembalang	11,73	5.038,38
Pedurungan	11,60	9.309,77
Genuk	7,82	5.099,22
Gayamsari	4,15	11.319,94
Semarang Timur	3,92	12.261,64
Semarang Utara	6,96	10.347,60
Semarang Tengah	3,26	10.672,11

Semarang Barat	8,81	6.888,81
Tugu	1,99	1.201,59
Ngaliyan	8,59	3.384,58
Total Kota Semarang	100,00	4.534,07

Sumber : Semarang Dalam Angka 2024

Secara geografis, Kota Semarang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di antara garis lintang $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis bujur $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Kota Semarang memiliki peran strategis sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan Kota Semarang pada jalur utama lalu lintas ekonomi Pulau Jawa membuat kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul penting aktivitas perdagangan, distribusi, dan jasa.

Peran strategis tersebut semakin diperkuat dengan fungsi Kota Semarang sebagai koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terhubung melalui empat jalur utama, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, dukungan infrastruktur transportasi yang relatif lengkap, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, menjadikan Kota Semarang berfungsi sebagai gerbang perekonomian Jawa Tengah dan kawasan tengah Pulau Jawa.

Dari sisi kondisi alam, Kota Semarang memiliki suhu udara yang berkisar antara 20–35°C dengan suhu rata-rata sekitar 27°C, sehingga dikenal memiliki iklim yang relatif panas baik bagi penduduk setempat maupun pendatang. Kontur wilayah Kota Semarang juga cukup bervariasi, dengan ketinggian antara 0,75 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Secara topografis, wilayah kota ini terbagi menjadi dua karakter utama, yaitu daerah dataran rendah di bagian utara yang dikenal sebagai Semarang Bawah dan wilayah perbukitan di bagian selatan yang disebut Semarang Atas. Semarang Atas memiliki ketinggian sekitar 90–359 meter di atas permukaan laut, sementara Semarang Bawah berada pada ketinggian sekitar 0,75–3,5 meter di atas permukaan laut. Variasi topografi tersebut turut membentuk perbedaan aktivitas ekonomi, pola permukiman, serta tingkat kerentanan UMKM terhadap risiko lingkungan di masing-masing wilayah.

2.1.2 Kondisi perekonomian daerah

Perekonomian Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pemulihan yang relatif kuat, terutama setelah tekanan pandemi mereda. Berdasarkan rilis resmi BPS Kota Semarang, ekonomi Kota Semarang tahun 2023 tumbuh 5,79%. Pada tahun yang sama, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat 248.902.606,75 juta rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 161.849.112,44 juta rupiah. Dalam struktur perekonomian, sektor yang disebut sebagai kontributor utama PDRB Kota Semarang adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Bila ditarik ke UMKM, struktur ekonomi seperti ini memberi dua implikasi. Pertama, sektor perdagangan-jasa yang kuat biasanya membuka ruang luas bagi UMKM, terutama yang bergerak di ritel, kuliner, jasa personal, jasa pendukung, dan perdagangan berbasis komunitas. Kedua, kuatnya industri pengolahan dan konstruksi berpotensi menciptakan permintaan turunan bagi UMKM misalnya penyediaan bahan/komponen skala kecil, kebutuhan konsumsi pekerja, jasa transportasi lokal, hingga penyediaan barang dan jasa pendukung di sekitar kawasan produksi dan proyek konstruksi.

2.2 Gambaran Umum UMKM di Kota Semarang

UMKM di Kota Semarang dapat dipahami sebagai tulang punggung ekonomi sehari-hari yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. UMKM bergerak dekat dengan kebutuhan warga, mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan pasar, serta menyerap tenaga kerja pada tingkat komunitas. Kehadiran UMKM dalam kehidupan kota tidak hanya sebatas unit ekonomi, tetapi juga membentuk suatu “jaringan penghidupan” yang meliputi berbagai sektor, mulai dari warung makan, penjual kebutuhan harian, usaha rumahan, pedagang online, jasa laundry, bengkel kecil, kerajinan tangan, hingga katering rumahan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga ikut membentuk kehidupan sosial-ekonomi yang dinamis di Kota Semarang.

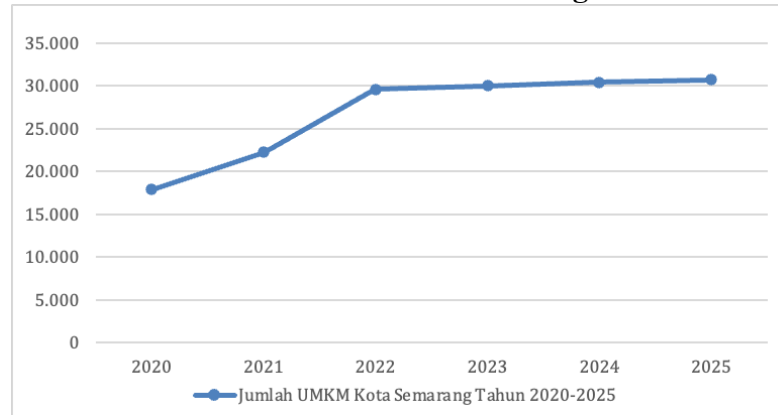
UMKM di Kota Semarang menunjukkan keberagaman yang signifikan. Banyak usaha mikro dijalankan secara keluarga atau komunitas, memanfaatkan

keterampilan lokal, bahan baku yang mudah diakses, dan jaringan distribusi sederhana. Hal ini membuat UMKM lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan strategi usaha secara cepat ketika menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan preferensi konsumen. Keunggulan ini juga terlihat pada kemunculan berbagai inovasi digital, seperti pemasaran online melalui media sosial dan platform e-commerce, yang semakin mempermudah UMKM menjangkau konsumen di luar wilayah lokal.

Pemerintah Kota Semarang telah menyadari pentingnya peran UMKM dan berupaya membangun kanal pendataan serta informasi pelaku usaha mikro melalui sistem digital. Selain menjadi motor penggerak ekonomi lokal, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, kapasitas manajemen yang terbatas, dan persaingan dengan usaha skala besar atau platform digital global. Namun, di sisi lain, UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pembinaan pemerintah, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dalam jaringan usaha dan komunitas. Peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan lokal, serta memelihara budaya dan kearifan lokal membuat keberadaan mereka menjadi sangat strategis. Dengan memahami gambaran umum UMKM ini, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana pelaku UMKM di Kota Semarang mampu beradaptasi dan membangun ketahanan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

2.2.1 Perkembangan jumlah UMKM (2020–2025)

Gambar 2. 2 Jumlah UMKM Kota Semarang Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, jumlah UMKM di Kota Semarang selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 17.913 unit pada tahun 2020 menjadi 22.242 unit pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 29.611 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah tersebut tercatat sebanyak 30.024 unit, lalu bertambah menjadi 30.423 unit pada tahun 2024, dan mencapai 30.714 unit pada tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif terdapat pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Semarang pada periode pandemi hingga kondisi terkini. Sebagai gambaran umum objek penelitian, data ini penting untuk menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki perkembangan UMKM yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kondisi usaha telah membaik secara merata. Kenaikan angka UMKM juga dapat dipengaruhi oleh munculnya usaha baru sebagai respons

terhadap tekanan ekonomi rumah tangga pascapandemi, perluasan pendataan oleh pemerintah daerah, serta adanya pelaku usaha yang tetap bertahan melalui berbagai bentuk adaptasi usaha. Sebab itu, data pertumbuhan jumlah UMKM dalam subbab ini perlu dipahami sebagai gambaran perkembangan kuantitatif, sedangkan kondisi riil keberlangsungan usaha, tingkat ketahanan, dan kemampuan adaptasi pelaku UMKM dianalisis lebih lanjut pada bagian temuan penelitian. Dengan demikian, pembacaan terhadap perkembangan jumlah UMKM tidak berhenti pada pertumbuhan angka, tetapi juga diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai resiliensi UMKM di Kota Semarang.

2.2.2 Peran UMKM bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata, karena kontribusinya mencakup berbagai dimensi kehidupan ekonomi dan sosial. Pertama, UMKM menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga, di mana banyak keluarga bergantung pada hasil usaha yang dijalankan sendiri atau bersama anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini membuat UMKM berfungsi sebagai tumpuan ekonomi keluarga, terutama di kawasan yang belum tersentuh oleh investasi besar dan industri modern. Kedua, UMKM berperan sebagai pencipta lapangan kerja yang cepat, mengingat skala usaha yang fleksibel serta kemampuan menyerap tenaga kerja lokal secara lebih luas dibandingkan perusahaan besar; fenomena ini penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menyediakan peluang pekerjaan bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses kerja formal. Ketiga, UMKM memiliki peran

signifikan dalam mempertahankan perputaran ekonomi di tingkat lingkungan, di mana uang yang beredar dari aktivitas UMKM lokal cenderung tetap berada di dalam komunitas sekitar melalui konsumsi barang dan jasa sehari-hari, sehingga memperkuat ekonomi mikro dan memperkecil ketergantungan terhadap sektor luar daerah. Kontribusi nyata UMKM terhadap perekonomian lokal ini juga tercermin dalam perannya dalam memajukan produksi lokal, meningkatkan diversifikasi ekonomi, serta memberikan ruang bagi inovasi produk yang berbasis budaya dan sumber daya setempat.

Pada kebijakan daerah, penguatan UMKM tidak hanya dipandang sebagai instrumen pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penopang pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah daerah menyadari bahwa UMKM dapat memperkuat struktur ekonomi lokal dengan memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendukung pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, termasuk pertimbangan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pengembangan UMKM sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jejaring kemitraan, pelatihan, serta fasilitasi pemasaran yang efektif. Dukungan kebijakan ini penting karena selain mendorong UMKM agar lebih tangguh dalam menghadapi persaingan, juga membantu mereka berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, dan keseimbangan distribusi ekonomi di setiap

wilayah, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2.3 Kondisi UMKM Kota Semarang pada Masa Pandemi hingga kondisi terkini

Pandemi Covid-19 menjadi ujian serius bagi UMKM di Kota Semarang karena berdampak langsung pada dua sisi utama kegiatan usaha, yaitu sisi permintaan dan sisi operasional. Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan daya beli menurun, sementara dari sisi operasional pelaku UMKM harus menghadapi pembatasan jam usaha, gangguan pasokan bahan baku, serta tambahan biaya terkait kesehatan dan keamanan. Secara makro menurut Pustakadata Semarang Kota, kondisi ini tercermin dalam statistik daerah yang menunjukkan pelemahan ekonomi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tercatat sebesar -1,85%. Salah satu komponen yang mengalami penurunan cukup tajam adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai -8,51%, menggambarkan iklim usaha yang kurang kondusif karena banyak pelaku usaha menahan ekspansi, mengurangi belanja modal, bahkan menghentikan kegiatan usahanya. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan pandemi tidak hanya bersifat sementara, tetapi turut memengaruhi keputusan ekonomi pelaku usaha dalam jangka pendek.

Pada UMKM, dampak pandemi muncul secara nyata dalam kehidupan sehari-hari pelaku usaha, seperti penurunan omzet, berkurangnya jumlah pelanggan, kenaikan harga atau kelangkaan bahan baku, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. UMKM yang bergantung pada aktivitas keramaian, seperti yang berada di sekitar

sekolah, perkantoran, kegiatan pariwisata, dan event, cenderung mengalami tekanan lebih besar. Sebaliknya, UMKM yang mampu beradaptasi dengan cepat melalui pemanfaatan layanan pesan-antar, penjualan berbasis digital, dan promosi daring relatif lebih mampu bertahan. Memasuki fase pemulihan pandemi, pemulihan ekonomi Kota Semarang mulai terlihat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 hingga 2023.

2.4 Kebijakan dan Program Pemerintah Kota Semarang untuk UMKM

Secara garis besar, arah kebijakan pemerintah daerah untuk UMKM di Kota Semarang dapat dilihat sebagai kombinasi antara penguatan regulasi/kerangka kerja, penguatan akses pembiayaan, pendampingan dan pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta digitalisasi pendataan dan layanan.

2.4.1 Peraturan Wali Kota Semarang No. 66 Tahun 2022 (jejaring kemitraan usaha mikro)

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran UMKM melalui pendekatan kolaboratif. Dalam ketentuan umumnya, jejaring kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut melibatkan tidak hanya pelaku usaha mikro, tetapi juga usaha kecil, menengah, usaha besar, serta pemangku kepentingan lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa

pemerintah daerah memandang penguatan UMKM tidak cukup dilakukan secara parsial atau individual, melainkan membutuhkan keterhubungan antarpelaku ekonomi dalam suatu ekosistem usaha yang lebih luas dan terstruktur. Dengan adanya jejaring kemitraan, UMKM diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, akses sumber daya, dan perluasan peluang usaha.

Peraturan Wali Kota ini juga secara eksplisit mengarahkan tujuan dan manfaat jejaring kemitraan sebagai sarana pendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Jejaring kemitraan diposisikan sebagai instrumen yang memudahkan pelaku usaha mikro dalam memperoleh pendampingan usaha, pelatihan peningkatan keterampilan, akses pemasaran, serta akses terhadap sumber permodalan. Arah kebijakan ini penting karena menegaskan bahwa persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga mencakup aspek kapasitas manajerial, jaringan pasar, dan keberlanjutan usaha. Dari sudut pandang program pembangunan daerah, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Semarang untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih kondusif dan berkelanjutan, di mana peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani hubungan antara UMKM dengan berbagai aktor ekonomi lainnya. Pendekatan berbasis jejaring ini menjadi relevan terutama dalam hal pemulihan ekonomi setelah pandemi, karena mampu memperkuat daya tahan dan kemampuan adaptasi UMKM dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha yang semakin dinamis.

2.4.2 Program pemberdayaan (pendampingan, pelatihan, permodalan, pemasaran, digitalisasi)

Program pemberdayaan UMKM di Kota Semarang disusun dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan saling terintegrasi. Pemerintah daerah tidak memosisikan UMKM hanya sebagai objek bantuan, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang perlu diperkuat kapasitas dan daya saingnya secara bertahap. Sebab itu, program pemberdayaan dirancang mencakup aspek pendampingan, pelatihan, permodalan, pemasaran, hingga digitalisasi, yang masing-masing saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM.

Pendampingan menjadi tahapan awal yang krusial dalam proses pemberdayaan UMKM. Banyak pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas, standar produk, serta tata kelola usaha dasar. Melalui pendampingan, UMKM difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memenuhi persyaratan perizinan seperti PIRT dan sertifikasi halal, memperbaiki kemasan produk, serta melindungi identitas usaha melalui Hak Kekayaan Intelektual. Tahap ini penting karena legalitas dan standar usaha menjadi prasyarat utama agar UMKM dapat mengakses program lanjutan, termasuk pembiayaan dan kemitraan pemasaran.

Selanjutnya, program pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM. Pelatihan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup penguatan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Melalui pelatihan ini, pelaku UMKM didorong untuk memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, sehingga usaha tidak

hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki arah pengembangan yang jelas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak semata bertumpu pada bantuan fisik, melainkan pada penguatan kompetensi pelaku usaha itu sendiri.

Aspek permodalan menjadi bagian penting berikutnya dalam rangka mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi akses pembiayaan melalui skema kredit dengan bunga relatif rendah, yang dirancang agar sesuai dengan kemampuan usaha mikro. Akses permodalan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas skala usaha secara bertahap. Namun demikian, permodalan tidak dilepaskan dari proses pendampingan dan pelatihan, sehingga penggunaan dana lebih terarah dan berkelanjutan.

Penguatan pemasaran dan digitalisasi menjadi respons terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. UMKM didorong untuk memanfaatkan platform digital, seperti *marketplace* dan media sosial, serta difasilitasi untuk masuk ke saluran pemasaran offline melalui pameran, galeri UMKM, dan kemitraan dengan ritel maupun sektor pariwisata. Digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi semata, tetapi sebagai strategi adaptasi agar UMKM mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis.